

Gus Mus:

Kantor NU Bukan Tempat Bicara Politik Praktis

Arif Hulwan Muzayyin & FHR, CNN Indonesia | Kamis, 09/08/2018 08:09 WIB



Tokoh NU KH Mustofa Bisri atau Gus Mus, di Tuntang, Semarang, 2016.

(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Jakarta, CNN Indonesia -- Tokoh Nahdlatul Ulama Mustafa Bisri alias Gus Mus mengatakan tak perlu ada pembicaraan soal politik praktis di kantor PBNU. Baginya, kantor PBNU bukan tempat yang tepat untuk bicara soal itu.

"Para pengurus/pemimpin NU yang harus bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan; terutama bila berkaitan dengan politik praktis," cuitnya, melalui akun Twitter @gusmusgusmu, Kamis (9/8).

"Dan sebaiknya tak usah bicara politik praktis di kantor NU. Bukan tempatnya," sambung dia, yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, itu.



A. Mustofa Bisri

[✓@gusmusgusmu](#)

Para pengurus/pemimpin NU yang harus bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan; terutama bila berkaitan dengan politik praktis. Dan sebaiknya tak usah bicara politik praktis di kantor NU. Bukan tempatnya.

NU Online

[✓@nu_online](#)

Robikin Emhas Klarifikasi soal Berita Ancaman ke Jokowi <http://dlvr.it/QfCQ8s>

[1:36 AM - Aug 9, 2018](#)

Sebelumnya, sebuah pertemuan digelar di kantor PBNU, Jl. Kramat Raya, Jakarta, Rabu (8/8).

Dalam pertemuan tersebut hadir di antaranya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Ketua PBNU Robikin Emhas.

Lihat juga:

[PBNU: Jika Bukan NU, Tak Ada Tanggung Jawab Menangkan Jokowi](#)

Saat itu, Robikin menyebut Presiden Jokowi harus mengambil kader dari NU sebagai cawapresnya jika ingin mendapatkan dukungan dari PBNU.

Jika bukan warga nahdliyin, pihaknya mengaku tak memiliki tanggung jawab moral untuk memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019.

Robikin sebelumnya menyebut PBNU bukan parpol, saat ditanya soal isu penarikan dukungan terhadap Jokowi.



Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Jumat (9/3). (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

"Emang PBNU partai politik? NU bukan partai politik, karena itu tidak memiliki kapasitas untuk mengusung atau apa, enggak ada kapasitas itu," kata Ketua PBNU Robikin Emhas kepada *CNNIndonesia.com*, Selasa (7/8).

Terpisah, Ma'ruf Amin mengimbau warga NU bersikap tenang dan tak terprovokasi menanggapi isu cawapres untuk Jokowi itu.

"Tenang saja. Waspada. Jangan terprovokasi. Sekarang ini belum ada apa-apa," kata dia, dikutip dari laman resmi PBNU, Rabu (8/8).

Lihat juga:

Politik Kaum Nahdliyin, Jokowi dan Cermin Pilpres 2004

Ia yang juga menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menegaskan bahwa PBNU tetap memegang teguh pada prinsip dan nilai-nilai Islam. Ini sudah diputuskan oleh para kiai dalam forum Muktamar NU, Munas NU, dan Konferensi Besar alim ulama NU sebelumnya.

Dalam forum itu selalu ditegaskan bahwa PBNU tetap pada khittahnya, yakni sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang peribadatan, pendidikan Islam, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan.

"Jadi Khittah NU itu berkaitan erat dengan *manhajul fikr* [cara berpikir] yang sejalan dengan Qanun Asasi NU. Sampai sekarang NU masih setia berpegang pada khittah-nya," kata Ma'ruf.



Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Sebelumnya, di kubu Jokowi mencuat nama cawapres berinisial M yang disebut merupakan tokoh dari kalangan NU. Diduga, itu adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

Ketua PBNU Said Aqil Siroj lantas menyatakan Mahfud MD bukan kader NU. Ia juga menyebut Mahfud belum pernah menjabat sebagai pengurus organisasi yang berafiliasi dengan NU.

(gil)